

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan kemudian dilakukan pembahasan, maka dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Malang khususnya dalam perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti dengan rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan di lingkungan pemerintah daerah.
3. Perencanaan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur sudah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan usulan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* terutama prinsip efektif, akuntabel dan demokratis, namun demikian usulan itu belum optimal sehingga masih ada aparatur yang seharusnya dapat mengikuti program dan kegiatan terkait dengan peningkatan SDM, tidak dapat mengikuti karena data kepegawaian yang ada di Organisasi Perangkat Daerah belum dikelola dengan baik.
4. Dalam pelaksanaan program sudah disusun standar operasional, sehingga memudahkan program tersebut dilaksanakan, namun perlu komitmen dalam pelaksanaannya.

5. Dalam menyusun perencanaan kebutuhan akan aparatur yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam mendukung kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah didahului dengan analisis kebutuhan pegawai, namun dokumen yang sudah disusun belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena masih ada faktor politis dalam merealisasikan hasil analisis tersebut.
6. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah dilakukan, namun demikian hasil evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga capaian program dan kegiatan dari tahun ke tahun cenderung tetap.
7. Dalam pengelolaan data kepegawaian sudah menggunakan teknologi informasi tetapi hanya sebatas pada Badan Kepegawaian Daerah, belum terintegrasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sehingga belum optimal dalam menyajikan data kepegawaian
8. Alokasi anggaran untuk pengembangan aparatur di Kabupaten Malang mengalami kenaikan pagu anggaran dari tahun ke tahun, namun demikian pagu anggaran setelah anggaran itu disahkan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas, beberapa saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi terkait program dan kegiatan khususnya dalam sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Malang, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan tujuan yang ditetapkan dapat diwujudkan, khususnya program dan kegiatan

yang berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM aparatur di Kabupaten Malang.

2. Perlu adanya komitmen dari Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan hasil analisis kebutuhan aparatur, sehingga perencanaan peningkatan kualitas aparatur dapat disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada.
3. Perlu dibuat inovasi program dan kegiatan dalam perencanaan peningkatan kualitas SDM aparatur, sehingga ada percepatan pelaksanaan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
4. Dilakukan pemetaan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penempatan personil berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, sehingga dapat optimal melaksanakan fungsinya.
5. Penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan data kepegawaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan server berada di Badan Kepegawaian Daerah, sehingga dapat dikelola data kepegawaian yang lebih baik dan akuntabel.
6. Perlu ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Malang terkait anggaran yang mendukung pengembangan kualitas SDM aparatur, dengan memberikan pagu anggaran yang cukup dalam peningkatan kualitas SDM aparatur sehingga kedepan dapat diwujudkan aparatur yang profesional dan mempunyai kemampuan yang baik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.